

Kelahiran Masyarakat Modern dalam Sosiologi Kontemporer

H.M. Ali Syamsuddin

ABSTRAK

Teori Marxisme kembali mempengaruhi dan menjadi kecenderungan dalam pemikiran Barat, tetapi dalam sosiologi masih dianggap sebagai “teori pinggiran” (marginal theory), “kurang diperhatikan” (unrespectable), dan masih sebagai “teori tandingan” (forefront), setidaknya hingga dasawarsa 1960an dan 1970-an. Dewasa ini, para teoretisi Marxisme terus berusaha meraih kembali perannya dalam lingkaran sosiologis dengan cara memasukkan dan mengembangkan perspektif baru dalam konstruk teorinya. Di antara mereka ada yang lebih memperhatikan perkembangan internal kapitalisme Barat, dan yang lain lebih memperhatikan kaitan eksternalnya dan posisi kapitalisme Barat di dalam sistem dunia global.

Pendahuluan

Terdapat dua kelompok pemikir Marxisme, yaitu “Marxisme” yang tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx mengenai perlunya revolusi proletar, dan “NeoMarxisme” yang memasukkan dan mengembangkan perspektif baru dalam konstruk teorinya. Dalam memandang perkembangan kapitalisme Barat, kedua kelompok itu sepakat bahwa “sejak abad 19 hingga dewasa ini, kapitalisme tidak mengalami perubahan secara mendasar”. Perubahan hanya terjadi pada tataran “rincian substansi” bukan pada tataran “esensi” (*change in detail of substances rather than essence*), sehingga menurut mereka sama sekali tidak berdampak secara mendasar pada cara-cara produksi kapitalisme yang tetap “eksploitatif terhadap kelas pekerjaannya melalui pengambilalihan nilai tambah dari mereka”. Dalam permodalan, sistem kapitalisme Barat, menurut mereka, semakin mengarah pada pemusatan dan penguasaan ekonomis dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang monopolistis dan oligarkis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu,

dalam hal pekerja, perhatian pada persamaan kesempatan dan mobilitas secara substansial tidak mengalami peningkatan. Bahkan walaupun isu-isu persamaan didengungkan hanya ditujukan pada sejumlah orang saja, dan tidak pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, yang terjadi dewasa ini, bukan “sebuah epos baru” melainkan hanya sebagai “perkembangan lebih jauh” dari sistem kapitalisme.

Kelompok pertama, meyakini bahwa “kapitalisme Barat memiliki mekanisme psikologis untuk melakukan penyeimbangan diri dalam mengantisipasi kontradiksi dan konflik internal yang terjadi. Melalui kekuatan dan hubungan di dalam produksi kapitalisme yang semakin berkembang dan matang, pada akhirnya akan semakin memperkuat sistem kapitalisme. Hal ini terjadi karena konflik yang terjadi di antara kelas kapitalis yang berkuasa (*capitalist the ruling class*) berhasil memantapkan tatanan sosial dan menstabilkan sistem karena mereka dapat membangun aliansi dan memobilisasi kepercayaan dan sikap kelas kedua (*second class*) untuk turut mendukung keabsahan sistem melalui penciptaan

institusi dan asosiasi budaya. Antonio Gramsci berpendapat bahwa munculnya kelas kedua dengan berbagai institusi dan asosiasi budayanya telah melahirkan hegemoni baru yang dapat menggagalkan pengembangan “kesadaran dan revolusi kelas” (*class consciousness and revolutionary*), sehingga kekuatan oposisi “kelas pekerja” (*working class*) dapat direduksi dan dibatasi.

Sedangkan Marcuse (1964) melihat bahwa masyarakat kapitalis memiliki ciri-ciri, antara lain: (1) selalu berupaya mengaburkan arti kebebasan; (2) mampu membuat rakyat mengidentifikasi dirinya dengan sistem yang menekannya; (3) menekan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengembangkan lebih lanjut kesadaran kelasnya; (4) mampu menekan kemungkinan terjadinya oposisi lebih jauh dari kelas pekerja yang dikhawatirkan bisa menimbulkan perubahan sosial. Hal ini mereka lakukan dengan cara: (a) pengembangan teknologi untuk meningkatkan kemakmuran bagi semua rakyat; (b) memberikan kepada rakyat kebebasan terbatas; (c) mendongungkan perdagangan; (d) mengembangkan kebudayaan massa; (e) menjadikan seks sebagai strategi konformitas.

Kelompok kedua (*Marxisme*), memandang bahwa justru kekuatan dan hubungan di dalam produksi kapitalisme yang semakin berkembang dan matang akan semakin mempertajam pertentangan dan krisis yang terjadi, yang pada akhirnya mengantarkan pada kehancuran sistem kapitalisme dan perlunya “revolusi proletar”. Baran dan Sweezy (1966) memandang karena kapitalisme dewasa ini di satu sisi, masih terus menambah produksi barang ekonomi hingga melampaui batas, tetapi di sisi lain “gagal” menyediakan konsumsi dan investasi yang dapat menghindari terjadinya surplus dan meningkatkan “kelembutan” kerja sistem, sehingga di dalam sistem kapitalisme depresi dan krisis berkembang semakin mendalam. Untuk mengantisipasi krisis dan depresi yang terjadi, menurut Baran dan Sweezy di dalam sistem kapitalisme mengembangkan berbagai cara: (1) merangsang peningkatan konsumsi melalui

promosi; (2) mendorong lahirnya inovasi palsu dan tidak dibutuhkan disertai dengan propaganda bahwa yang terbaru adalah yang terbaik; (3) mengadakan pajak dan memasukkan dalam anggaran belanja pemerintah untuk menurunkan peningkatan permintaan.

Potensi konflik umum dalam sistem kapitalisme mendapat penekanan dari Habermas (1975). Berbeda dengan Marcuse yang melihat potensi konflik dan pertentangan dalam sistem kapitalisme secara internal, sedangkan Habermas melihatnya dari faktor eksternal. Ada tiga faktor menurut Habermas sebagai sumber pertentangan dalam sistem kapitalisme, yaitu *negara*, *budaya*, dan *sosialisasi*. Faktor “negara” muncul dari adanya pertentangan di antara negara kapitalis sendiri. Pertentangan terjadi karena setiap negara kapitalis memiliki perbedaan dalam kemampuan mengelola sistem ekonomi kapitalistiknya secara efektif. Faktor “budaya” berupa persoalan legitimasi. Persoalan ini muncul karena penerimaan terhadap sistem kapitalisme tidak hanya bergantung pada kemampuan menyediakan bahan pangan tetapi juga bergantung pada kemampuan “meyakinkan” rakyat bahwa tindakan-tindakan yang diambil adalah “sah” dan “tepat”. Faktor “sosialisasi” berkaitan dengan persoalan identitas individual. Selama ini sistem kapitalistik mendapat dukungan terhadap pembentukan “identitas individual” secara tradisional dari keluarga dan gereja yang berasal dari budaya prakapitalis. Sejalan dengan perkembangan sistem kapitalisme dukungan tradisional tersebut semakin menurun, sementara sumber-sumber dukungan baru tidak diperoleh. Kondisi ini akhirnya melahirkan krisis identitas secara potensial. Ketiga faktor inilah yang menurut Habermas sebagai “faktor mendasar bagi terjadinya krisis dan pertentangan di dalam sistem kapitalisme yang akan melahirkan kesadaran kelas dan kebutuhan pada emansipasi”. Sejalan dengan Habermas, O’Connor (1973) juga melihat potensi pertentangan dan krisis kapitalisme yang bersumber dari “pertentangan di antara negara kapitalis”.

Perspektif Marxisme tentang Sistem Dunia: Teori Dependensi

Teori dependensi dalam perspektif Marxisme lahir dari upaya penganutnya untuk memperluas perspektif teoretisnya dengan memandang fenomena kapitalisme Barat. Menurut mereka, untuk mengkaji kapitalisme Barat tidak bisa dilakukan semata-mata melihat tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, baik yang terjadi di Barat maupun yang berkembang di Dunia Ketiga secara terpisah. Kajian tentang kapitalisme juga harus dilihat pula dalam konteks yang lebih luas, serta kaitan antara negara kapitalis yang satu dengan yang lain sebagai suatu sistem dunia secara keseluruhan. Pemikiran ini sebenarnya sudah dikemukakan sejak awal oleh Marx ketika menunjukkan bagaimana “dunia baru” dan awal perdagangan di Timur Dekat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme; juga oleh Lenin ketika dia melihat arti penting dan krusial imperialisme bagi perkembangan kapitalisme. Namun, Marx, Lenin, dan teoretisi Marxisme terdahulu tidak mengembangkan suatu pemikiran konseptual yang sistematis mengenai dampak kapitalisme Barat terhadap negara-negara Dunia Ketiga, yang mengakibatkan mereka secara lambat laun namun pasti mengadopsi pola-pola produksi yang kapitalistik sebelum pada akhirnya menjadi negara sosialis. Hanya saja, Marx tidak menjelaskan “bagaimana hal itu terjadi”.

Melihat “kekosongan” konseptual ini, penganut Marxisme mulai mengembangkan suatu teori yang dikenal sebagai ‘teori ketergantungan’. Teori ketergantungan ini dikonstruksi, antara lain, oleh Paul Baran, Andre Gunder Frank, Samir Amin, dan Immanuel Wallerstein. Menurut penganut teori ketergantungan ini, terjadinya keterbelakangan yang terjadi di Dunia Ketiga bukan hanya karena kekokohan mereka berpegang pada pola-pola sosial tradisional, melainkan juga karena mereka ditarik ke dalam orbit kapitalisme. Kecuali itu karena negara Barat sebagai pusat kekuatan kapitalis tidak hanya berhasil mengambil alih nilai tambah dari kelas pekerja tetapi juga memeras nilai tambah ekonomi dari negara-negara dunia ketiga. Kondisi

ini kemudian melahirkan ketergantungan dari negara-negara Dunia Ketiga kepada negara-negara kapitalis Barat, dan menciptakan suatu sistem stratifikasi dunia yang menempatkan negara Barat menjadi negara metropolis, pusat, atau negara inti kapitalis yang bertindak sebagai kelas penguasa dunia sementara negara-negara Dunia Ketiga menjadi negara-negara boneka atau pinggiran yang harus mengakui dan patuh pada peran internasional dunia Barat.

Paul Baran (1975) adalah ahli pertama yang berkontribusi terhadap gagasan inti teori ketergantungan, setelah melihat adanya konflik kepentingan antara dunia Barat dan Dunia Ketiga. Menurutnya, perkembangan ekonomi Dunia Ketiga banyak didominasi oleh kepentingan negara-negara kapitalis Barat. Mereka banyak menyediakan bahan-bahan mentah, menyediakan keuntungan-keuntungan dan investasi-investasi bagi korporasi-korporasi dunia Barat. Dengan kata lain, Dunia Ketiga dijadikan sebagai negara sumber bagi industrialisasi Barat. Eksploitasi semacam itu memainkan peranan penting dalam perkembangan kapitalisme, sementara pertumbuhan ekonomi Barat agak tertahan. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara dunia ketiga disebabkan oleh faktor: (1) terjadinya perpindahan berskala besar dalam surplus ekonomi mereka; (2) kesalahan umum dalam arah kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi, sehingga surplus potensial dan intrusi Barat secara bersamaan berdampak negatif pada akumulasi kapital asli mereka; (3) bantuan-bantuan ekonomi dan investasi yang diterima dari negara Barat, tidak dirancang untuk mempercepat perkembangan ekonomi mereka, melainkan digunakan untuk menyogok rakyat untuk mencegah mereka mempersoalkan sistem yang berlaku; (4) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk; (5) korupsi oleh aparat pemerintah; (6) pengurasan sumber kekayaan alam oleh kelas penguasa mereka sendiri; dan (6) kembalinya sebagian keuntungan oleh negara-negara investor.

Lain halnya dengan Samir Amin, memperluas teori dependensi ini dalam kasus Afrika. Menurutnya keterbelakangan Dunia Ketiga (Afrika

khususnya) terjadi karena ketidaksamaan pertukaran antara dunia ketiga dan Barat sebagai akibat lebih lanjut dari konsolidasi monopoli kapitalisme. Dalam sistem konsolidasi yang monopolistis ini struktur instusional diadakan agar lebih memungkinkan bagi negara pusat mengekspor modal dalam jumlah besar ke negara pinggir. Melalui bantuan modal tersebut negara pinggir dapat membangun perusahaan-perusahaan besar yang dapat menyerap tenaga-tenaga kerja rendah dengan upah rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Namun ternyata keuntungan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan, karena kapasitas produksi lebih cepat dari kapasitas konsumsi, sehingga muncul pertentangan. Kontradiksi ini semakin tinggi ketika pada saat bersamaan dikembangkan kesatuan-kesatuan perdagangan (*trade unions*), yang berarti pula akan terjadi peningkatan kapasitas pekerja dan peningkatan upah. Peningkatan upah dengan sendirinya akan menurunkan keuntungan rata-rata di negara pusat. Situasi ini sangat mengganggu negara kapitalisme Barat, akan tetapi tidak dapat diantisipasi oleh peningkatan keuntungan negara dunia ketiga dengan posisinya yang pinggir.

Ketidakadilan global menjadi basis dari sistem ekonomi dunia yang kapitalistik, terutama dalam pengupahan. Di satu sisi, negara Dunia Ketiga memberikan upah rendah sementara di Barat memberikan upah tinggi. Pembentukan kesatuan-kesatuan perdagangan antara pusat pinggir diharapkan akan menjadi solusi bagi pusat, di mana negara pusat dapat mendistorsi ekonomi negara pinggir dengan cara mengharuskan adanya kebijakan pemotongan biaya upah dan ekspor untuk memenuhi kebutuhannya. Distorsi pola-pola produksi di negara Dunia Ketiga ini menyebabkan banyak rakyat tercerabut dari tanah miliknya, atau *proletarisasi* tanpa disertai dengan upaya menciptakan lapangan kerja bagi mereka (bdk. Geertz, 1964). Dengan kata lain, tradisionalisme dalam pola-pola produksi di Dunia Ketiga berdampak pada terjadinya kemunduran, karena banyak pekerja tidak terserap ke dalam proses produksi, yang pada akhirnya menghambat

terjadinya pertumbuhan yang berkelanjutan dari dalam pada Dunia Ketiga.

Dalam sistem kapitalisme dunia ini, negara pusat cukup menyediakan modal untuk diinvestasikan di negara pinggir, sehingga terjadi akumulasi modal. Dengan modal yang ada, negara pinggir dapat melakukan aktivitas perusahaan dan meningkatkan produktivitasnya dengan pengeluaran per kapita yang rendah karena terjadi pemotongan biaya upah pekerja secara paksa yang berarti pula biaya produksi bisa ditekan ke tingkat yang lebih rendah. Rendahnya upah pekerja ini menjadi institusi penting dalam perkembangan kapitalisme di negara pusat, karena produk-produk yang dijual ke negara pusat harganya lebih rendah dari biaya hidup di negara pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam arti pendapatan per kapita di negara pusat meningkat dan akumulasi modal pun semakin besar. Sementara di negara pinggir pertumbuhan ekonomi dalam arti pendapatan per kapita di negara pinggir menjadi stagnan. Dalam pandangan Wallerstein, pertumbuhan yang menguntungkan di negara pusat ini kemudian melahirkan sebuah sistem yang tidak hanya bersifat sistem timbal-balik antara dua negara seperti dikemukakan oleh penganut teori ketergantungan yang lain, melainkan sebuah sistem segitiga dominasi dunia (*a tripartite system of world domination*) antara: (1) negara Barat sebagai negara pusat yang mendominasi; (2) kelompok negara-negara semi pinggir yang berperan sebagai klas menengah atau sistem klas domestik (*a domestic class system*) dalam mata rantai sistem kapitalisme dunia antara negara pusat dan negara pinggir. Eksistensi negara semi pinggir ini dapat menciptakan keseimbangan dalam sistem kapitalisme dunia akibat terjadinya polarisasi ekonomi antara negara pusat dan negara pinggir. Namun demikian, munculnya negara semi pinggir ini eksploitasi terhadap negara pinggir menjadi ganda (oleh negara pusat dan negara semi pinggir); dan (3) negara produksi industri (*industrial production states*) dan negara pertanian -perdagangan (*commercialized-agriculture states*) yang secara khusus diarahkan untuk menghasilkan barang-barang pokok untuk

keperluan ekspor dan konsumsi bagi negara-negara pusat.

Munculnya sistem segitiga dominasi dunia ini menurut Wallerstein lebih memungkinkan negara-negara pusat mengambil posisi yang lebih besar dalam proses massifikasi surplus ekonomi, serta dapat menciptakan dan mempertahankan mekanisasi negara di negara pinggir. Selain itu juga, negara pusat akan berkembang kelompok-kelompok pemilik tanah kapitalis yang berperan sebagai pedagang-pedagang yang dapat mengambil sebagian keuntungan negara yang kemudian mengarah pada penguatan aparatur negara, sementara di negara-negara pinggir muncul kelompok-kelompok kepentingan yang beragam yang justru mengarah pada pelemahan aparatur negara.

Teoretisi Marxisme lain, yaitu Amin membagi dinamika perkembangan kapitalisme menjadi tiga fase, yaitu: (1) merkantilisme; (2) kolonialisme; dan (3) neokolonialisme. *Periode merkantilisme* berlangsung sejak sekitar tahun 1800-an. Pada periode ini Eropa Barat Daya sebagai negara inti. Eropa mediterania (Spanyol, Portugal, dan Itali) muncul sebagai negara semi pinggir, sedangkan Eropa Timur, Eropa Barat dan sebagian besar negara Eropa daratan sebagai negara pinggir. Dewasa ini, komposisi negara-negara pusat selain Eropa Barat Daya di tambah lagi dengan Amerika Serikat; negara semi pinggir bertambah lagi dengan negara-negara blok komunis, negara penghasil minyak terutama dari Amerika Latin (Brazil dan Argentina) dan negara penghasil mobil (India dan Turki). Sedangkan negara pinggir mulai berkurang tinggal negara-negara lemah di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Periode ini bagi negara inti merupakan fase pengembangan dan pementapan dirinya sendiri sebagai inti sistem.

Perdagangan dunia yang monopolistik dengan dukungan kekuatan militer merupakan karakteristik fase ini. Negara inti sebagai pemegang supremasi eksploitasi perdagangan dunia yang baru pertama kali dimulai negara-negara lain non Barat. Mereka juga mengimpor barang dari negara non Barat dengan harga rendah sehingga mampu mengakumulasi modal. Perdagangan budak (*slave*

trade) juga dilakukan, terutama di negara Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Brazil dan kepulauan Karibia. Orang-orang Indian pun mereka pekerjakan di sektor pertambangan. Seluruh hasilnya dialirkan ke Barat, sehingga memberikan surplus modal bagi mereka. Sistem monopolistik dalam perdagangan Barat Timur ini berdampak regresif bagi negara Dunia Ketiga, karena impor produk-produk industri negara inti membanjiri dunia ketiga yang mengakibatkan tertahannya pertumbuhannya dan industrialisasi mereka. Kemunduran industri peleburan baja di India dan keruntuhan industri di India merupakan fenomena utama dalam kasus ini. Dengan kata lain, merkantilisme tidak hanya menghancurkan seluruh industri di dunia ketiga, tetapi juga mengembalikan kehidupan mereka ke masa-masa awal abad 19.

Periode kolonial berlangsung sekitar pertengahan abad 20. Sekitar tahun 1900-an Eropa Barat-Daya dan Amerika muncul sebagai negara pusat, dan negara-negara Eropa Mediterania, Austria, Hngaria, Rusia, dan Jepang muncul sebagai negara semi pinggir, serta Kanada, Australia dan Selandia Baru sebagai negara pinggir. Periode kolonialisme ini menyempurnakan dominasi Barat atas Dunia Ketiga yang sudah dimulai pada masa merkantilisme. Kekuasaan politik menjadi instrumen eksploitasi baru bagi dominasi Barat dengan dampak yang sangat buruk terhadap ekonomi dunia ketiga. Sejumlah kebijakan politik. Ekonomi mereka terapkan, seperti: (1) perpajakan, (2) pembentukan organisasi produksi dan pemasaran dalam bentuk korporasi-korporasi raksasa; (3) pembentukan organisasi jaringan pemasaran keluar negeri. Ekspor hasil industri Barat semakin merajalela, dan lebih jauh telah menciptakan ekonomi ganda (*two layer economy*) di seluruh negara dunia ketiga dengan segala dampak ketidakadilan sosialnya. Pada akhir periode kolonialisme negara-negara dunia ketiga telah menjadi kawasan yang secara ekonomi tidak berguna, jalur pemasaran ke luar dibatasi, dan kontrol politik secara langsung sulit diadakan.

Periode Neo-kolonial muncul setelah PD II, di mana batas-batas wilayah negara menjadi terpilah-pilah dan melahirkan negara Dunia Ketiga

yang kemudian mengubah hegemoni Barat. Karakteristik pokok periode ini adalah terbentuknya korporasi multinasional (*multinational corporation*), yang tumbuh semakin meluas dalam ukuran dan kekuasaannya. Sekarang, tidak kurang dari 200-an korporasi multinasional yang menguasai separuh pengeluaran dunia, dan menjadi instrumen utama Barat untuk mendominasi ekonomi (barang, pasaran, dan harga) di seluruh dunia ketiga. Korporasi-korporasi multinasional ini juga berperan sebagai penyandang dana bantuan bagi dunia ketiga dengan bunga antara 15-20% dari jumlah total bantuan. Akibatnya, negara Dunia Ketiga mengalami pertumbuhan defisit dalam imbang neraca pembayarannya terhadap mereka, serta membuatnya semakin bergantung terhadap Barat.

Dalam situasi ini, menurut penganut teori modernisasi, Barat harus mengambil alternatif dengan memberikan emansipasi melalui modernisasi atau pembangunan sebagai perdamaian mendasar agar terhindar dari munculnya gerakan protes dan revolusi terhadap Barat. Akan tetapi, kelompok neo Marxisme tetap bersikukuh perlunya revolusi proletar dari kaum tani terhadap masyarakat industrialis dan kapitalis Barat sebagai prasyarat terciptanya perdamaian mendasar di seluruh dunia ketiga. Kasus gerakan protes dan revolusi kaum tani yang terjadi di Cina, Kuba, Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai bukti yang dianggap mendukung teori mereka. Sementara bagi kelompok Marxisme ortodoks agar tidak terjadi revolusi negara-negara dunia ketiga perlu dikembangkan hingga mencapai tingkat perkembangan kapitalis, tetapi bagi kelompok neo Marxisme hal itu tidak perlu sebab sebagai bagian dari sistem kapitalisme negara Dunia Ketiga tidak perlu secara internal dijadikan negara kapitalis; dan dari pengalaman imperialisme selama ini, hal seperti itu tidak cukup sebagai prasyarat terjadinya revolusi.

Komentar dan Kritik terhadap Teori Marxisme dan Teori Ketergantungan

Komentar dan kritik terhadap teori Marxisme dan Ketergantungan akan difokuskan pada kasus-

kasus: (1) keberpihakan (*one sidedness*) pihak barat; (2) mobilitas dalam sistem dunia; (3) problema negara-negara komunis dan penghasil minyak; dan (4) testabilitas teori Marxisme dan ketergantungan secara empirik.

Munculnya teori Marxisme dan Ketergantungan secara intelektual telah menjadi mode pada era 1960-an dan berhasil memangkas teori-teori "*mainstream*" waktu itu. Akan tetapi, dewasa ini tidak lagi menjadi pelopor dalam kajian-kajian sosiologi kontemporer. Di satu sisi, tak dapat dibantah kebenaran pandangan teori Marxisme bahwa teori modernisasi telah menciptakan ketidakadilan akibat sikap patronase mereka dan sikap penganaktirian terhadap Dunia Ketiga. Di sisi lain, Marxisme gagal memberikan keuntungan kepada kelas pekerjaannya untuk menerapkan gagasan-gagasannya, serta mengabaikan pengakuan nilai hak-hak politik dan kebebasan warga negara di negara-negara Barat dibandingkan negara komunis. Marxisme juga dianggap gagal memperhitungkan kemampuan kapitalisme Barat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Demikian pula halnya dengan teori ketergantungan. Pandangan mereka bahwa Barat bersikap memihak atau berat sebelah (*one sidedness*) terhadap Dunia Ketiga, dan sikap eksploitatif menjadi karakter utama sistem kapitalisme dunia dan modernisasi Barat sebagai suatu hal penting. Akan tetapi, ketika konsep eksploitasi telah mereka jadikan sebagai instrumen analisis yang bersifat eksklusif, apakah hal itu cukup solid untuk menjelaskan fenomena pembangunan yang terjadi baik di Barat atau di Timur? Sejarawan sosial Rubinsein menyatakan, "saya menganggap bahwa hal itu hanya sebagai gaung (*echo*) dari pendapat sebagian besar sejarawan". Teori modernisasi mungkin salah karena kurang mepedulikan pentingnya perimbangan kekuasaan dunia, di mana prakarsa modernisasi di Barat tidak juga didorong terjadi di bagian dunia yang lain, dan terlalu memperhatikan faktor luar dari pada faktor dari dalam (dunia ketiga). Di lain pihak, teori ketergantungan juga kurang cocok karena hanya menekankan pada faktor-faktor

domestik dalam kerangka pemikirannya tentang persoalan yang sama, dan hanya sebagian dari penganutnya yang memperhatikan peran faktor asli (kekuatan mekanisme negara atau konsolidasi monopoli dalam sistem kapitalisme Barat). Penganut teori ketergantungan lebih terfokus pada perspektif sistem dunia sementara faktor intra sosial dipinggirkan.

Dalam kaitan ini, Skocpol (1977) berpandangan bahwa adanya kesamaan alur pemikiran dalam teori ketergantungan terjadi karena mereka terperangkap di dalam kesan bayangan dalam upaya untuk menciptakan sebuah paradigma baru dalam polemik menentang langsung pandangan lama. Hanya saja polemik yang demikian, menurut Skocpol, akan stagnan apabila mereka tidak kritis dalam menetapkan pola-pola kategori teoretiknya. Akan lebih baik dan dapat dikembangkan unit-unit analisis baru manakala mereka menjadikan analisis sistem sebagai kategori teoretiknya. Sehingga, misalnya, akan terdapat dua sistem yang bertentangan, yaitu sistem dunia versus sistem nasional. Atas dasar kategori teoretik "sistem" ini cara-cara baru dalam mengkaji persoalan-persoalan dan hubungan-hubungan dalam sistem kapitalisme akan lebih tepat, serta dapat meninggalkan pendekatan-pendekatan lama. Dengan kata lain, penganut teori ketergantungan kurang mengambil keuntungan dengan bertindak melalui cara-cara baru, alih-alih lebih menunjukkan sikap "retroaktif" terhadap pandangan teori modernisasi. Analisis mereka kurang sistematis, tidak ada upaya untuk memadukan antara faktor internal dan faktor sistem dunia dalam memahami kelambanan proses modernisasi di negara-negara Dunia Ketiga. Wallerstein, misalnya, hanya melihat peran kekuatan negara yang memungkinkan posisi Barat dalam sistem dunia dan pembangunan dunia ketiga lebih lanjut diuntungkan. Padahal, pada periode yang menjadi fokus kajiannya (abad 16) tidak semua negara Eropa menggunakan model itu. Belanda, misalnya, sebagai negara inti mungkin berjuang untuk menjadi negara kuat, ternyata yang berperan bukan pemerintahannya melainkan sebuah persekutuan dagang yang oligarkis (VOC). Spanyol sebagai negara monarkhi absolut menurut

Wallerstein, berhasil berjuang untuk menegakkan dominasi Barat atas dunia baru. Akan tetapi, ketika Spanyol runtuh dan beralih dari posisi sebagai negara inti ke negara semi pinggirannya ternyata sistem absolutismenya masih bertahan.

Di sisi lain, paradigma sistem dunia tampaknya telah banyak memberikan dasar-dasar kesatuan bagi terciptanya sistem eksploitasi dunia yang membuat Barat berhasil memetik keuntungan secara meyakinkan. Namun kemudian muncul pertanyaan, ketika di berbagai negara Dunia Ketiga bangkit kekuatan menentang sistem dunia ini. Dalam hal ini, teori ketergantungan telah menunjukkan bagaimana negara-negara tersebut bergerak naik-turun dalam sistem global tersebut. Dalam hal ini paradigma sistem dunia gagal menjelaskan munculnya fenomena mobilitas yang terjadi. Jepang yang semula hanya sebagai negara semi-pinggiran dalam sistem dunia, kini bergerak ke atas menjadi negara inti dengan cara mengambil peluang yang terdapat di dalam pengaruh Barat. Akan tetapi, dalam kasus naiknya Amerika sebagai negara koloni menjadi negara inti, agak sulit dijelaskan dari paradigma sistem dunia. Mobilitas ke atas negara-negara Kanada, Australia, dan Selandia Baru juga hanya dapat dijelaskan dengan melihat kemampuan mereka untuk bersikap relatif mandiri di dalam sistem kolonial, karena adanya dukungan kekuatan internal dan potensi kapitalisme penduduk asli mereka sendiri yang dibawa dari daerah asalnya (Eropa).

Bagaimanapun klaim teori ketergantungan bahwa keberhasilan Barat melakukan pembangunan lebih lanjut melalui keuntungan yang diperoleh dari terciptanya sistem dunia, secara substantif terdapat kesulitan. Walaupun dengan paradigma sistem dunia tersebut mereka berhasil menunjukkan betapa Barat adalah sebagai kekuatan kolonial terbesar dengan tingkat perkembangan tinggi. Negara Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sebagai negara inti memang sebagai kekuatan kolonial besar, akan tetapi tidak demikian halnya dengan negara Amerika Serikat. Dia bukan hanya sebagai negara inti tetapi negara inti dari negara inti (*core of the core*). Memang benar bahwa Amerika Serikat berhasil merantai

semua negara di dunia melalui penetrasi neo kolonialisme ke negara-negara Dunia Ketiga, akan tetapi kekuatan ekonomi yang dimiliki tidak secara jelas berkaitan dengan penetrasinya. Bahkan, kepiawaian Amerika Serikat dalam neo kolonialisme (pada periode pasca PD.II) tidak lebih sebagai “hasil” daripada sebagai “sebab” kekuatan ekonominya.

Dalam kasus negara-negara komunis dan penghasil minyak, teori ketergantungan juga tidak memberikan penjelasan memuaskan tentang terjadinya mobilitas negara-negara tersebut dalam paradigma sistem-dunia, dan teori modernisasi pun tidak memiliki konseptualisasi yang memadai. Namun, dalam kasus teori ketergantungan paradigma sistem-dunia yang digunakan hanya efektif untuk kajian dunia secara luas, dan kurang efektif apabila hanya ditujukan pada sejumlah negara besar tertentu. Teori ketergantungan memasukkan negara-negara komunis sebagai negara “pinggiran” dan “semi pinggiran” dalam sistem kapitalisme dunia. Padahal secara logika, negara-negara komunis sangat kuat menguasai hak-hak miliknya tidak seperti pada negara-negara blok kapitalis yang menjadikan negara Dunia Ketiga hanya sebagai negara aneksasi dan memberikan mereka peran-peran pinggiran. Wallerstein (1974) juga lebih menyulitkan ketika dia menegaskan bahwa negara-negara komunis secara faktual adalah negara kapitalis dan menjadi bagian dari suatu sistem kapitalisme dunia. Sejumlah penganut teori ketergantungan juga mulai beranggapan bahwa negara-negara komunis telah berubah menjadi bagian dari sistem kapitalisme dunia. Bahkan, mereka menganggap mereka terlalu menyederhanakan persoalan dengan mencari asumsi-asumsi rasional dalam upayanya mempertahankan konsistensi internal dalam kerangka teoretik yang digunakan. Terhadap pandangan tersebut, tampaknya banyak pengamat kurang percaya. Jika demikian halnya, konsep Marxisme tentang sistem dunia runtuh, karena telah keluar dari kerangka berpikir yang digunakan.

Di sisi lain, teori ketergantungan telah memberikan kontribusi besar terhadap pengertian kita tentang negara maju dan negara berkembang,

walaupun masih dipersoalkan untuk memberikan pengertian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dewasa ini. Hoogvelt (1976) menyatakan bahwa sejak tahun 1973 negara-negara penghasil minyak menaikkan harga minyaknya hingga empat kali lipat dan hal ini tampaknya tidak begitu saja dikembalikan pada sistem ekonomi Barat. Pandangan Hoogvelt tersebut justifikasinya diragukan, selama dunia masih mengharapkan kemurahan hati dari negara pusat kapitalis, dan nasib Emirat Arab (tidak kurang pula kelaparan yang terjadi di India dan Bangladesh) masih memperlihatkan gejala-gejala ketergantungan. Satu hal yang tak boleh diabaikan bahwa negara-negara penghasil minyak sekarang ini sama-sama telah merasa menikmati keuntungan monopoli minyaknya atas dunia Barat, dan apabila mengikuti teori ketergantungan, juga akan menimpa Dunia Ketiga selama beberapa tahun, dan tampaknya kekuatan ekonomi Barat tidak cukup mampu membendung kejadian tersebut. Dalam hal ini perlu disadari bahwa sejak tahun 1973 politik negara-negara kaya-minyak telah berdampak buruk terhadap ekonomi Barat, tidak seperti yang terjadi pada politik Barat terhadap dunia ketiga. Tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa teori ketergantungan tidak valid, tetapi semakin menjelaskan betapa perlunya sebuah konseptualisasi baru, jika teori ketergantungan tidak akan menghadapi kegagalan.

Tak diragukan bahwa teori ketergantungan dan teori modernisasi telah memberikan kontribusi untuk memahami fenomena negara maju dan berkembang, walaupun secara umum keduanya tidak cukup kritis. Pengujian empirik secara ketat perlu dilakukan untuk melihat keampuhan validitas dan kebermaknaan relatifnya. Untuk teori modernisasi, pengujian secara empirik salah satunya adalah dengan cara mengkaji secara empirik “dampak atau pengaruhnya” baik terhadap perkembangan ekonomi, terhadap kualitas SDM, kejituan orientasi dan nilai teoretiknya bagi perkembangan ekonomi (McClelland, 1973), dan pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi (Inkeles & Smith, 1974). Berbagai kajian perbandingan terdahulu dari

Edding (1966) yang membuktikan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan masyarakat dengan tingkat perkembangan ekonomi; studi Peaslee (1967) yang membuktikan adanya korelasi antara tingkat kemakmuran negara dengan peningkatan anggaran pendidikannya, memang telah meningkatkan keyakinan bahwa pendidikan dapat mendorong terjadinya perkembangan ekonomi. Akan tetapi, belum menjawab persoalan apakah perkembangan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pendidikan *perse*, ataukah lebih disebabkan oleh tingkat pertumbuhan konstan ekonomi sebelumnya”.

Sementara untuk teori ketergantungan, tampaknya terdapat kesulitan. Salah satunya adalah persoalan rivalitas interpretasi tentang data empirik yang dapat diterima. Hoogvelt (1976) misalnya berpendapat bahwa penerapan “pendapatan perkapita” penduduk menurut tingkat Produksi Bruto Nasional (GNP) sebagai basis penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya valid, karena tingkat pertumbuhan penduduk antara Barat dan Dunia Ketiga tidak seimbang, dan tidak adil apabila keduanya diperbandingkan dengan suatu ukuran yang sama. Keberatan lain yang diajukan kepada teori ketergantungan adalah pandangannya bahwa ketergantungan identik dengan kemiskinan ekonomi di pihak Dunia Ketiga. Bantuan luar negeri dan investasi asing kepada dunia ketiga ternyata telah menimbulkan kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Hasil penelitian Kaufman (1975) terhadap sejumlah negara Amerika Latin, dan studi McGowan (1976) negara-negara Afrika sama-sama menyimpulkan bahwa proposisi teori ketergantungan tersebut tidak didukung oleh bukti empirik. Bornschier (1978) atas dasar perbandingan secara luas terhadap sejumlah studi yang pernah dilakukan sampai pada kesimpulan bahwa bantuan luar negeri dan investasi asing kepada dunia ketiga terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, walaupun dalam jangka panjang, akumulasi bantuan luar negeri dan investasi asing tersebut dapat mereduksi pertumbuhan ekonomi mereka. Atas dasar hasil-hasil studi empirik di atas, dukungan empirik

terhadap teori modernisasi dan teori ketergantungan masih relatif terbatas.

Penutup

Dari urian di atas, dapat dikatakan bahwa teori marxisme, neo marxisme, dan teori ketergantungan telah banyak memberikan kejelasan tentang faktor-faktor krusial dalam pembangunan dan kelahiran masyarakat modern, sebagaimana dirasakan dalam kehidupan dewasa ini, terutama bagi negara dunia ketiga (negara pinggiran) yang banyak memperoleh tekanan ekonomi dan selalu mengharap bantuan dari negara pusat seperti Amerika yang senantiasa siap untuk menguasai dan mengeruk keuntungan yang jauh lebih besar dan berlangsung dalam waktu yang panjang melalui bantuan yang diberikannya, membuat ketidakberdayaan negara yang mengantungkan kepadanya. Karena itu, alangkah naifnya bila negara pinggiran seperti Indonesia tidak berjuang untuk lepas dari ketergantungan terhadap negara pusat. Akan sangat lebih hina lagi jika pemerintahan yang hanya karena ingin memperpanjang masa kekuasaannya bersedia menjadi boneka yang siap didikte negara pusat, karena dalam waktu yang tidak lama lagi suatu negara yang memperkuat ketergantungan akan terjual. Sedangkan teori ketergantungan dan teori modernisasi walaupun secara paradigmatis masih belum lengkap. Sebagai teori, keduanya bersifat komplementer karena variabel dari teori modernisasi lebih baik bila digunakan oleh teori ketergantungan. Dalam kaitan ini Alexander (1979) menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi di dalam kedua teori tersebut memerlukan suatu perubahan konseptual secara signifikan berkaitan dengan adanya persaingan paradigma seperti dikemukakan oleh Kuhn (2001) “...sudah saatnya kita harus memilih satu atau lain paradigma sebagai cara untuk membatasi dan mendekati materi kajian, dan bagaimana penjelasan perlu dirumuskan. Hal ini penting, agar masing-masing teori tidak hanya mendasarkan diri pada sikap saling tidak setuju tetapi lebih pada terciptanya debat ilmiah yang berkesinambungan”.

Dengan kata lain, perlu adanya sebuah

“paradigma baru” yang lebih memungkinkan munculnya berbagai variabel krusial berkaitan dengan fenomena modernisasi dan ketergantungan. Kebijakan dari para sosiolog untuk lebih mendalami realitas sosial dan memasukkan pula secara bijak realitas sosial ke dalam karya-karya sosiologinya perlu menjadi komitmen mereka.

Ⓜ

Daftar Pustaka

Bornschieer, V. et.al. 1978. “Crossnational Evidence of the Effects of Foreign Investment and Aid on Economic Growth and Inequality”. Dalam *American Journal of Sociology*, 84:651-683.

Fukuyama, F. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan*

Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Qalam.

Kasvio, A. 2000. *Information Society as A Theoretical Research Programme: Methodological Starting Points for Concrete Analysis*. Tersedia di: <http://www.info.uta.fi/winsoc/engl/lect/theory.html>.

Kaufman, R. et.al. 1975. “A Preliminary Test of the Theory of Independency” dalam *Comparative Politics* (Chicago). 7:303-330.

Kuhn, T.S. 2001. *The Scientific Revolution (Peran Paradigma dalam Revolusi Sains)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

McGowan, P.J. 1976. “Economic Dependence and Economic Performance in Black Africa” dalam *The Journal of Modern African Studies* (Cambridge). 14:25-40.

Wallerstein, I. 1974. *The Modern World System*. New York: Academic press.

